

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232).

Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Hal tersebut dimaksudkan agar daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan

pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing - masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing - masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing - masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah. Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, serta pembangunan daerah bias diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Muliana (2009) menyatakan bahwa PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Struktur PAD yang kuat juga menunjukkan daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemkot. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Pemkab/Pemko tersebut dapat dikatakan mandiri (Muliana,2008). PAD itu sendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat

efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169). Lalu yang melatar belakangi penelitian ini adalah banyaknya daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang serapan PAD nya masih bermasalah. Berikut grafik Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat :



Gambar 1.1 Kondisi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat yang mengalami masalah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 70% Pemda mengalami permasalahan dan hanya 30% Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat yang tidak mengalami masalah. Dari seluruh Pemda yang mengalami masalah berikut Kota/Kabupaten yang memiliki masalah dalam PAD Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat diantaranya Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.

Permasalahan PAD Pemda di wilayah Jawa Barat terjadi dikarenakan diantaranya :

- a. pajak restoran dan hiburan yang tidak memenuhi target,
- b. sektor wisata yang belum maksimal,
- c. anggaran APBD yang belum maksimal,
- d. banyaknya potensi pajak yang tidak bias dikumpulkan, retribusi parkir yang masih rendah dan,
- e. kontribusi PAD yang masih berada pada tingkat yang rendah.

Beberapa hal tersebut yang mengakibatkan masalah dalam Pendapatan Asli Daerah di beberapa Kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, hanya 30% yang PAD Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat yang tidak mengalami masalah dalam PAD atau dapat dikatakan baik dan mampu melalui target. Beberapa komponen yang mempengaruhi PAD Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat meningkat diantaranya yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,43%, 1,89% dan 5,40% terhadap PAD Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya melalui Pajak Air Permukaan (PAP) dengan kontribusi sebesar 0,41% terhadap pajak daerah atau 0,38 terhadap pendapatan asli daerah atau 0,23% terhadap pendapatan daerah. Kelima adalah melalui Pajak Rokok yang berkontribusi sebesar 14,67% terhadap pajak daerah atau 13,54% terhadap pendapatan asli daerah atau 8,33% terhadap pendapatan daerah Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat (JabarProv).

Menurut hasil penelitian Nur'ainy (2013) pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena pertumbuhan ekonomi (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Pertumbuhan Ekonomi adalah penambahan output yang disebabkan oleh penambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi (Schumpeter,2013). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah provinsi/Kabupaten/Kota. Pertumbuhan Ekonomi Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat triwulan III-2018 terhadap triwulan III-2017 tumbuh 5,58 persen meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,20 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,85 persen. Sementara dari sisi pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit tumbuh sebesar 18,92 persen. Pada akhir Desember diketahui bahwa ekonomi Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 tumbuh 5,64 persen meningkat dibanding tahun 2017. Di wilayah Provinsi Jawa Barat yang 42 persen ekonominya digerakan oleh sektor manufaktur dan sebagian besar berorientasi ekspor tentu akan sangat berpengaruh (Badan Pusat Statistik Jawa Barat,

2018). Ketika pasar negara tujuan ekspor Jawa Barat permintaannya menurun maka kinerja ekspor di wilayah Provinsi Jawa Barat pun akan menukik kebawah. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah terbilang cukup baik namun, belum semua wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dikarenakan tingkat pengeluaran yang berbeda antar kelompok masyarakat, upah yang merupakan faktor lain, dan sektor pertanian, perikanan dan perternakan yang menurun dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Menurut hasil penelitian Ariani (2010) menyatakan bahwa beanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah karena keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah mempunyai strategis bahwa sasaran penggunaanya untuk membiayai pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang dapat enunjang kelancaran usaha dan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Darise,2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penganggaran belanja modal harus didasarkan pada keyakinan adanya sumber penerimaan untuk mendanai belanja tersebut. Hal ini membentuk pemahaman pada pemerintah daerah bahwa apabila ingin

mengetahui belanja modal, maka perubahan atas komponen-komponen yang menjadi sumber penerimaan harus dipastikan dulu.

Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Pemerintah daerah sudah seharusnya lebih memaksimalkan potensi daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan pendapatan anggaran daerah lebih dialokasikan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Akan tetapi, faktanya dalam anggaran pendapatan dan belanja, porsi anggaran aparatur masih jauh lebih besar daripada anggaran untuk rakyat misalnya anggaran belanja modal, anggarannya lebih kecil daripada belanja pegawai. Pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Barat mempercepat proses belanja modal di sejumlah organisasi perangkat dinas (OPD). Anggaran belanja daerah Pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Barat 2018 mencapai 94,42 persen dari total Rp 35,7 triliun. Hal itu sesuai dengan prediksi pemerintah, serapan anggaran 2018 bisa terrealisasi 93-95 persen. Penyerapan anggaran tahun 2018 terbilang terbesar dalam sepanjang sejarah di wilayah Provinsi Jawa Barat, dari sisi total angka *absolute* dari total Rp 35,7 triliun, realisasinya Rp 33,76 triliun. Belanja langsung, di mana anggarannya Rp 8,5 triliun realisasinya Rp 7,82 triliun, atau berarti 91,8 persen (Nurullah, 2019). Artinya proses perencanaan cukup baik bahkan baik. Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih termasuk daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi. Dengan kemandirian daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja

daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri. Tetapi di beberapa kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat masih ada beberapa hal yang menjadi masalah yaitu anggaran tidak terserap maksimal, sehingga pembangunan menjadi tersendat.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Permasalahan yang banyak dihadapi mengenai pengalokasian anggaran belanja modal yang masih belum stabil terjadi di Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat
2. Realisasi PAD yang mengalami defisit dan rendahnya serapan PAD di wilayah Provinsi Jawa Barat
3. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil di wilayah Provinsi Jawa Barat

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Tingkat Kemandirian di wilayah Provinsi Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat
5. Seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui Belanja Modal di wilayah Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui Tingkat Kemandirin di wilayah Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.4.1 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.2 Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.4.3 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait yakni sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, serta dapat memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya khususnya tentang tingkat kemandirian keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, maka penulis mengambil data yang diunduh dari *jabar.bps.go.id* dan situs lain yang dapat mendukung penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di definisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh

masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Menurut Boediono (2010:28) Pertumbuhan ekonomi yang berarti

“perluasan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan

Menurut Untoro (2011:10) pertumbuhan ekonomi adalah

“perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.”

Menurut Schumpeter (2013:411) pertumbuhan ekonomi adalah

“Pertambahan output yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.”

Menurut Adisasmita (2013:4) Pertumbuhan ekonomi merupakan

“upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.”

Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat

perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

2.1.1.2 Ciri – ciri Pertumbuhan Ekonomi

Ada enam ciri – ciri pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (2000:144) diantaranya

1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita.

Pertumbuhan ekonomi modern, yang sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19, ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Laju kenaikan yang luar biasa itu paling sedikit sebesar lima kali untuk penduduk dan paling sedikit sepuluh kali untuk produksi. Professor Kuznets menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di tiga belas negara tidak termasuk Perancis, pada masa modern yaitu lebih tinggi daripada masa pra-modern. Kecuali Perancis yang pertumbuhan penduduknya sebesar 2,5 persen per dasawarsa, laju pertumbuhan penduduk bergerak di sekitar 6 sampai 7 persen untuk Inggris, Swedia, Jerman Barat, Jepang dan Belanda, serta 19-24 persen untuk Kanada, Amerika Serikat, dan Australia.

2. Peningkatan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan suatu efisiensi atau produktivitas per unit input. Hal ini bisa dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau

semakin meningkatnya efisiensi atau kedua-duanya. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input. Menurut Kuznets, laju kenaikan produktivitas ternyata bisa menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju. Bahkan kendati dengan beberapa penyesuaian untuk menampung biaya dan input yang tersembunyi, pertumbuhan produktivita tetap bisa menjelaskan lebih dari separuh pertumbuhan dalam produk per kapita.

3. Laju Perubahan Struktural yang Tinggi.

Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan terhadap hukum serta perubahan status kerja buruh.

4. Urbanisasi

Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Inilah yang disebut urbanisasi. Urbanisasi pada umumnya adalah produk industrialisasi. Skala ekonomi yang muncul dalam usaha non agraris sebagai hasil perubahan teknologi mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan.

Karena sarana teknis transportasi, komunikasi dan organisasi berkembang menjadi lebih efektif, maka terjadilah penyebaran unit-unit skala optimum. Semua proses ini memengaruhi pengelompokan penduduk berdasarkan status sosial dan ekonomi serta mengubah pola dasar kehidupan.

5. Ekspansi Negara Maju

Pertumbuhan negara maju kebanyakan tidak sama. Pada beberapa bangsa, pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal daripada bangsa yang lain. Hal ini sebagian besar diakibatkan perbedaan latar belakang sejarah dan masa lalu. Ketika ilmu dan pengetahuan modern mulai berkembang.

6. Arus Barang, Modal, dan Orang Antarbangsa

Arus barang, modal, dan orang antarbangsa kian meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai Perang Dunia I tetapi mulai mundur pada perang dunia I dan berlanjut sampai akhir perang dunia II. Tapi demikian sejak awal tahun lima puluhan terjadilah peningkatan dalam arus barang, modal dan antarbangsa.

2.1.1.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan

yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011:332) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

b. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

c. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalan sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuab ekonomi.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu

perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Adisasmita (2014:91) mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut

a. **Ketidakseimbangan Pendapatan**

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b. **Perubahan Struktur Perekonomian**

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana

transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat

diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a) Pendekatan produksi PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, gas, dan air bersih
- 5) Bangunan dan Konstruksi
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- 9) Jasa-jasa lainnya

b) Pendekatan Pengeluaran PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
- 2) Konsumsi pemerintah

- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
 - 4) Pembentukan stok
 - 5) Ekspor netto (ekspor dikurang impor)
- c) Pendekatan pendapatan PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB , kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha. Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian

perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.

2.1.1.5 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Suparko dan Maria (2000) ada beberapa macam cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi diantaranya :

1. **Produk Domestik Bruto**

PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Untuk suatu daerah diukur melalui PDRB (Produk Regional Domestik Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

2. **PDB Perkapita atau Pendapatan Perkapita**

PDB per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.

3. **Pendapatan Perjam Kerja**

Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama.

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian menggunakan Produk Domestik Bruto dengan didasarkan atas harga berlaku. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2015 Produk Domestik Regional Bruto dapat dirumuskan sebagai :

$$Growth = \frac{PDRB_t - PDRB(t - 1)}{PDRB(t - 1)} \times 100\%$$

Growth : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRB_t : PDRB riil tahun sekarang

PRDB t-1 : PDRB riil tahun lalu

Ekonomi maju dan berkembang serta rakyat yang sejahtera menjadi cita-cita dari seluruh negara di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, negara melalui pemerintah dan jajarannya senantiasa mengoptimalkan indikator - indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, namun pada praktiknya yang menjadi tolok ukur adalah nilai PDB. Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi

menurun bahkan negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan nasional riil yang diperoleh negara pada periode tertentu lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan periode yang lalu.

2.1.1.6 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonom.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:67) PDRB didefinisikan sebagai “jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu.”

Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (structural transformation), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita. PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga

pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:

- 1) Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
- 2) Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
- 3) Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Mursyidi (2013: 305) pengertian belanja modal adalah

“pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) bahwa belanja modal adalah "pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan”.

Menurut menurut Halim & Kusufi (2012:107) belanja modal adalah sebagai

berikut :

“Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya”.

Menurut Halim (2008: 101) belanja modal merupakan

“pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan pengungkapan Belanja Pemerintahan menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset lainnya.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalis aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Dalam hal ini belanja modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Semakin

besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu juga sebaliknya. Rasio belanja modal menurut Mahmudi (2010:165) yaitu

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daeah}} \times 100\%$$

2.1.2.2 Macam - macam Belanja Modal

Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap lainnya; 6) Belanja Aset lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahn (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama :

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja

Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan

Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

2.1.2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum pemerintah daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

2.1.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Halim (2008:232) sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan menurut Mahmudi (2010:142) sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator kemandirian keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Mengetahui kemandirian keuangan daerah ini dapat menunjukkan seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut dapat diartikan terdapat peningkatan dana pemda yang disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan (DJPK, 2011). Rasio kemandirian keuangan daerah ini apabila hasil semakin tinggi maka akan semakin kecil angka ketergantungan daerah terhadap pihak lain (pemerintah pusat khususnya) dan berlaku sebaliknya. Rasio kemandirian dapat pula untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

2.1.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD (indikator kemandirian keuangan daerah) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah,
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah,

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah,
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Tangkilisan (2007:89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah potensi daerah.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:1) pendapatan asli daerah adalah

“penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Menurut Purnomo (2009:34) pendapatan asli daerah merupakan

“Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi”

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yaitu semua penerimaan yang bersumber dari wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang – udangan yang dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.4.1 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Purnomo (2009:34) Indikator Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :

- a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
- b. Retribusi Daerah (RD)
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :

- a. Sumbangan dari pemerintah
- b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan

c. Pendapatan lain-lain yang sah

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahun relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya potensi PAD disebabkan oleh beberapa faktor (Erry, 2005) yaitu:

1. Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
2. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
4. Adanya kebocoran-kebocoran atau kolusi.
5. Biaya pemungutan masih tinggi.
6. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi penerimaan PAD.
7. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya.
8. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Upaya dalam peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Kustiawan, 2005) :

1. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek personalia. Pelaksanaan upaya melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
 - b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. Memperbaiki dan menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.
 - d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.
 - f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
 - g. Memperbaiki sarana dan juga prasarana pungutan yang belum memadai.
2. Upaya Ekstensifikasi (Penggalian sumber-sumber penerimaan baru)

Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah usaha-usaha menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yaitu pungutan pajak daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pelaksanaan upaya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan peninjauan terhadap Perundang-undangan yang berlaku kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - b. Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat

terhadap Negara, maka perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak melalui peningkatan system pemungutan, sistem pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor (UU No. 33 Tahun 2004).

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1

NO	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Renny Nur'ainy (2013)	Pengaruh Pertumbuha Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Berdasarkan hasil penelitian Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2	Kurnia Rina Ariani dan Gustita Armawati Putri (2016)	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Berdasarkan hasil penelitian, Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan

			daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3	Putri Ika Sari (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
4	Imam Arief Nur Hidayatullah (2019)	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
5	Kurnia Rini Ariani (2010)	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tax Effort dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh positif terhadap Tax Effort dan Dana Alokasi Umum

			berpengaruh negatif terhadap Tax Effort.
6	Erstelita Tria Ramadhani Darwis (2015)	Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
7	Mochammad Reza Satria (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
8	Krest D Tolosang (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena kurangnya aktivitas berbagai kegiatan ekonomi. Sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
9	Hestu Pradipta Megariski (2016)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Berdasarkan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

10	Rostina (2014)	Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Se-Sumatera	Hasil penelitiannya adalah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah dan Investasi Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
11	Ramona Leni Gaghana, Paulus Kindangen dan Debby Ch Rotinsulu (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil penelitian Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
12	F Simatupang (2016)	Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	Berdasarkan penelitian Dana Perimbangan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara., sedangkan Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keunagn Daerah, dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian didukung oleh teori umum (*grand theory*) yaitu teori *fiscal federalism*. Teori *fiscal federalism* di dalamnya juga menjelaskan tentang pemerintah daerah mampu membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bentuk keefisienan anggaran bisa berjalan dengan baik dan dapat tercapai apabila anggaran pemerintah mampu dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori pengeluaran pemerintah. Dijelaskan oleh

Kasyati (2015) bahwa teori ini berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Peran pemerintah dalam perekonomian tidak dapat dipungkiri juga sangat membantu dalam perekonomian. Pemerintah menetapkan kebijakan pokok mengenai arah perekonomian melalui perencanaan, kebijakan pemerintah dan pengaturan. Pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan (Putriani, 2011). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro. Teori pengeluaran pemerintah diantaranya adalah Teori Peacock dan Wiserman yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun, masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk

membayar pajak. Keadaan normal menjelaskan meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu pula dengan pengeluaran pemerintah menjadi besar. Menurut teori Peacock dan Wiserman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Karena itulah pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

Berdasarkan definisi teori diatas maka pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh besar terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah dengan membayar pajak.

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Semakin berkembangnya usaha hotel dan restoran maka akan menyebabkan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), peningkatan tersebut akan meningkatkan pajak daerah yang nantinya

juga akan berpengaruh terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Jika pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri.

Penelitian ini didukung oleh Putri (2014) yang mengatakan bahwa

“Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi.”

Kemudian yang dikemukakan oleh Marunung (2004) mengatakan bahwa

“kegiatan ekonomi suatu daerah yang meningkat, dengan meningkatnya kegiatan ekonomi akan berdampak terhadap tingkat kemakmuran serta kemandirian daerah. Dengan adanya kegiatan ekonomi daerah yang meningkat maka pendapatan asli daerah (PAD) juga akan meningkat yang pada akhirnya dengan meningkatnya PAD maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat karena PAD merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah”

Didukung oleh penelitian terdahulu oleh Nur'ainy (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Satria (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan hasil penelitian oleh Gaghana dkk (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Karena aktivitas berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi dalam perekonomian di Kota Tomohon tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dalam pemerintahan maupun pembangunan. Maka dapat disimpulkan

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah meskipun ada daerah yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi berarti dalam suatu daerah tersebut terjadi peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan produksi barang dan jasa yang tentunya akan meningkat penerimaan penduduk dan pemerintah daerah. Semakin meningkat retribusi pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga cenderung meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga akan semakin baik.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Setiap pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai. Belanja modal adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Apabila masyarakat sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka masyarakat dapat menjalankan roda perekonomiannya, dan menjalankan segala aktifitasnya yang berimbas pada meningkatnya kemampuan mereka membayar sejumlah pungutan yang telah ditetapkan, baik itu berupa pajak maupun retribusi. Kondisi ini dapat menambah pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk belanja modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini didukung oleh Rostina (2014) dan Simatupang (2016) bahwa :

“jika belanja meningkat maka akan meningkatnya tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja – belanja daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor.”

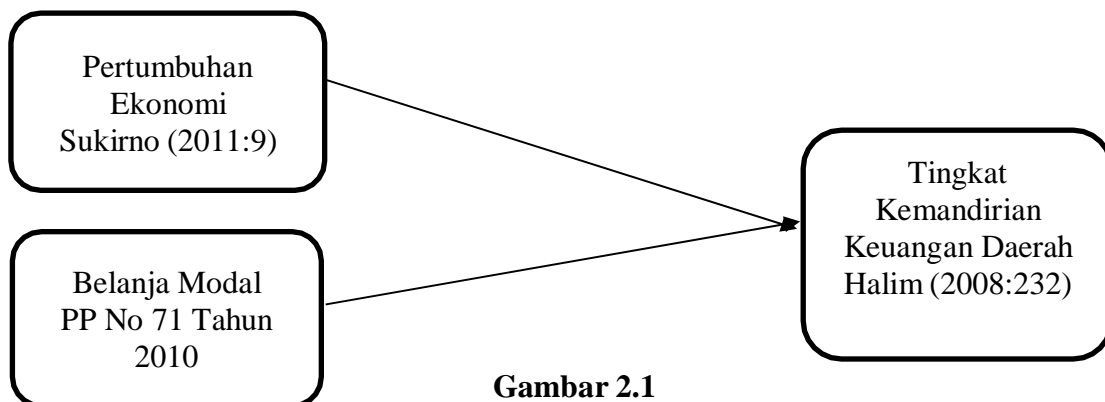
Sedangkan menurut Harianto dan Adi (2007) mengatakan bahwa :

“Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah, yang juga secara tidak langsung akan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.”

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ariani dan Putri (2016) mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, menurut Ariani (2010) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Lalu penelitian oleh Simatupang (2016) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, menurut Megariski (2016) bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan hasil penelitian oleh Rostina (2014) juga menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tetapi adapun hasil yang berbeda diantaranya penelitian oleh Hidayatullah (2019) mengatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikutnya oleh Darwis (2015) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Maka dari itu jika belanja modalnya meningkat maka tingkat kemandirian keuangannya pun dapat meningkat. Belanja modal ini mampu memberikan peran penting dalam meningkatkan keuangan daerah. Tetapi jika belanja modal tidak mampu memberikan andil yang besar berarti kemandirian keuangan daerahnya tidak dapat tercapai. Semakin besar anggaran belanja modal maka semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerahnya atau dapat dikatakan tercapai.

2.3.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan gambaran sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori yang ada, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian

Keuangan Daerah.

H_2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan

Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Menurut Umar (2003:303) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut:

“Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

Objek penelitiannya adalah pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

3.1.2 Metode Penelitian yang digunakan

Menurut Sugiyono (2017:2) Metode Penelitian yaitu :

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Menurut I Made Wiratha (2006:68) metode penelitian yaitu :

“Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.”

Menurut Darmadi (2013:153), metode penelitian adalah

“suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu”

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif.

Menurut Sugiyono (2017: 8) metode penelitian kuantitatif yaitu:

“metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Menurut Emzir (2009 : 28) penelitian kuantitatif adalah

“suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma post positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori.”

Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu lalu menggunakan pengukuran dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

Adapun pendekatan deskriptif dan verifikatif diantaranya :

Menurut Nazir (2009:54) penelitian deskriptif adalah

“metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.”

Menurut Sugiyono (2014:53) menyatakan pengertian deskriptif adalah

“Penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).”

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel – variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan tingkat kemandirian

keuangan daerah khususnya pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2018.

Sedangkan pendekatan verifikatif menurut Sugiyono (2017:55) adalah

“metode penelitian yang pada dasarnya untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel X1 dan X2, terhadap Y. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.”

Menurut Moch. Nazir (2011:91) metode verifikatif adalah sebagai berikut:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga dapat dihasilkan pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Pendekatan verifikatif ini untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau adanya hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini pendekatan verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3.2 Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Sebelum pengumpulan data, harus ditetapkan beberapa variabel untuk menunjang penelitian dengan jelas.

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel penelitian adalah:

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

3.2.1.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2017:39) Variabel Bebas (*Independent Variable*) adalah “Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Dalam penelitian ini variabel bebas atau variabel independennya adalah Pertumbuhan Ekonomi (X_1) dan Belanja Modal (X_2).

1) Pertumbuhan Ekonomi

Dalam penelitian ini Menurut Schumpeter (2013:411) pertumbuhan ekonomi adalah

“Pertambahan output yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.”

Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah Produk Domestik Regional Bruto karena ini dapat mengukur pertumbuhannya.

$$\mathbf{Growth} = \frac{\mathbf{PDRBt - PDRB(t-1)}}{\mathbf{PDRB(t-1)}} \times \mathbf{100\%}$$

Growth = Pertumbuhan Ekonomi

PDRBt = PDRB tahun sekarang

PDRBt-1= PDRB tahun lalu

2) Belanja Modal

Menurut menurut Halim & Kusufi (2012:107) belanja modal adalah sebagai berikut :

“Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya”.

Pengukuran variabel belanja modal menurut Mahmudi (2010:165) ini diukur dengan skala rasio. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$\mathbf{Rasio\ Belanja\ Modal} = \frac{\mathbf{Total\ Belanja\ Modal}}{\mathbf{Total\ Belanja\ Daeah}} \times \mathbf{100\%}$$

3.2.1.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono (2017:39), Variabel Terikat (*Dependent Variable*) adalah

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan

Daerah (Y).

Dalam penelitian ini penulis mendefinisikan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kemandirian keuangan daerah adalah

“pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dan melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.”

Menurut Mahmudi (2010:142) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Jadi untuk menguting tingat kemandirian keuangan daerah ini dengan mencari rasio kemandirian keuangan daerah dengan PAD.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional Variabel untuk menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	<p>Pertambahan output yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilannya, pembangunannya, sementara untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.”.</p> <p>Schumpeter (2013:411)</p>	$Growth = \frac{PDRB_t - PDRB(t-1)}{PDRB(t-1)} \times 100\%$ <p><i>Growth</i> = Pertumbuhan Ekonomi PDRB_t = PDRB tahun sekarang PDRB_{t-1} = PDRB tahun lalu</p>	Rasio
2	Belanja Modal (X2)	<p>Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya”.</p> <p>Halim & Kusufi (2012:107)</p>	$RBM = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ <p>RBM = Total Belanja Daerah</p> <p>(Mahmudi, 2010:165)</p>	Rasio
3	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	<p>Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban</p>	$Y = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

	keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. (Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004)	Y = Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah PAD = Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2010:142)	
--	---	--	--

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 80) populasi adalah

“wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasinya adalah pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut daftar Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu :

Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.2

No	Kota/Kabupaten
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bandung Barat
3	Kabupaten Bekasi
4	Kabupaten Bogor

5	Kabupaten Ciamis
6	Kabupaten Cianjur
7	Kabupaten Cirebon
8	Kabupaten Garut
9	Kabupaten Indramayu
10	Kabupaten Karawang
11	Kabupaten Kuningan
12	Kabupaten Majalengka
13	Kabupaten Pangandaran
14	Kabupaten Purwakarta
15	Kabupaten Subang
16	Kabupaten Sukabumi
17	Kabupaten Sumedang
18	Kabupaten Tasikmalaya
19	Kota Bandung
20	Kota Banjar
21	Kota Bekasi
22	Kota Bogor
23	Kota Cimahi
24	Kota Cirebon
25	Kota Depok

26	Kota Sukabumi
27	Kota Tasikmalaya

3.3.2 Sampel Penelitian dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016:81) definisi sampel sebagai berikut :

“bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”

Teknik sampling yang digunakan penulis yaitu menggunakan *Non Probability Sampling* dengan menggunakan dengan menggunakan sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2016:82) definisi Non Probability Sampling adalah

“teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*.”

Menurut Sugiyono (2016:82) definisi Sampling Jenuh adalah

“teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 27 Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan dikalikan 3 tahun.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Menurut Sugiyono (2014:193) data sekunder adalah

“sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Data sekundernya ini berupa Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Hasil yang diperoleh dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2016 – 2018. Untuk data Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari situs <https://jabar.bps.go.id>.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data adalah

“Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Menurut Sarwono (2012:32), data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukannya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan kemandirian keuangan daerah didapat dari Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Tahun 2016 – 2018 dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari situs <https://jabar.bps.go.id>.

3.5 Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Analisis Data Deskriptif

Analisis data ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif lalu dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Analisis ini menggunakan *SPSS (Statistic Package for Social Science)*. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan nilai minimum, nilai maximum dan nilai

rata-rata. Sedangkan untuk menentukan kategori penilaian setiap nilai rata-rata (mean) perubahan pada variabel penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk menganalisis variabel – variabel yang akan diteliti.

- a. Menentukan Jumlah Kriteria yaitu 5 kriteria yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi
- b. Menentukan Selisih Nilai yaitu dengan maksimum dan minimum = (nilai maksimum – nilai minimum)
- c. Menentukan range (jarak interval) $\frac{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}{5 \text{ Kriteria}}$
- d. Menentukan nilai rata-rata setiap variabel penelitian
- e. Membuat daftar tabel frekuensi perubahan nilai untuk setiap variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

Kriteria Penilaian

Tabel 3.3

Sangat Rendah	Batas Atas (Nilai Min)	Range	Batas Atas 1
Rendah	(Batas Atas 1) + 0,01	Range	Batas Atas 2
Sedang	(Batas Atas 2) + 0,01	Range	Batas Atas 3
Tinggi	(Batas Atas 3) + 0,01	Range	Batas Atas 4
Sangat Tinggi	(Batas Atas 4) + 0,01	Range	Batas Atas 5

Keterangan :

- Batas atas 1 = batas bawah (nilai minimal) + (Range)
- Batas atas 2 = (batas atas 1 + 0,01) + (Range)

- Batas atas 3 = (batas atas 2 + 0,01) + (Range)
- Batas atas 4 = (batas atas 3 + 0,01) + (Range)
- Batas atas 5 = (batas atas 4 + 0,01) + (Range)= nilai maksimum

Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis *Pertumbuhan ekonomi, belnaja modal, dan kemandirian keuangan daerah* dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

- a) Menentukan laporan keuangan di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan diteliti.
- b) Menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi dengan rumus:
- c) Menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata dari keseluruhan.
- d) Membuat daftar tabel distribusi frekuensi nilai perubahan untuk setiap variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Kriteria Pertumbuhan Ekonomi

Interval	Kategori Pertumbuhan Ekonomi
1.77% - 4.70%	Sangat Rendah
4.70% - 7.64%	Rendah
7.64% - 10.58%	Sedang
10.58% - 13.51%	Tinggi
13.51% - 16.45%	Sangat Tinggi

Sumber : *Data diolah*

2. Belanja Modal (X2)

- a) Menentukan laporan keuangan di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan diteliti.
- b) Menghitung besarnya belanja modal dengan rumus:
- c) Menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata dari keseluruhan.
- d) Membuat daftar tabel distribusi frekuensi nilai perubahan untuk setiap variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kriteria Penilaian Belanja Modal

Interval	Kategori Belanja Modal
10,24% - 15,59%	Sangat Rendah
15,59% - 20,93%	Rendah
20,93% - 26,28%	Sedang
26,28% - 31,63%	Tinggi
31,63% - 36,97%	Sangat Tinggi

Sumber : *Data diolah*

3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3.6

Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Skala	Kriteria
00,00% - 25,00%	Sangat Rendah
25,01% - 50,00%	Rendah
50,01% - 75,00%	Sedang

75,01% - 100,00%	Tinggi
------------------	--------

Sumber: Halim 2001

3.5.2 Analisis data Verifikatif

Analisis verifikatif merupakan analisis model untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3.5.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linier, yaitu penaksir tidak bias dan terbaik atau sering disingkat BLUE (Blue Linier Unbias Estimate). Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, di antaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Menurut Duwi Priyatno (2012:144) Uji Normalitas adalah:

“Uji normalitas adalah untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.”

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terkait untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam

model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistic. Pengujian normalitas data menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov dalam *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

Menurut Singgih Santoso (2012: 393) dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu:

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi dari model regresi linier bahwa tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara variabel bebasnya. Untuk menguji hal tersebut maka diperlukan suatu uji yang disebut uji multikolinieritas.

Menurut Duwi Priyatno (2012:151) Multikolinieritas adalah:

“Multikolinieritas adalah keadaan di mana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas.”

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *tolerance* $> 0,10$,

batas VIF adalah 10, jika nilai $VIF < 10$, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Gujarati, 2012:432). Menurut Singgih Santoso (2012: 236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance} \text{ atau } Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterodastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heterodastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran dari varians pada grafik *scatterplot* pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisienkoefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji *rank-Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen

terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varians dari residual tidak Homogen), (Ghozali, 2011:139). 4. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi merupakan pengujian dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya.

Menurut Duwi Priyatno (2012:172) autokorelasi adalah:

“keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$), model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson (DWtest)*.”

Pengambilan keputusan pada uji *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut:

- $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Aturan pengujian autokorelasi negatif adalah:
 - Kalau d lebih besar dari pada $4-DL$, terdapat autokorelasi negatif.
 - Kalau d berada pada nilai $4-DU$ sampai $4-DL$, tidak bisa diambil kesimpulan.
 - Kalau nilai d lebih kecil dari pada $4-DU$, tidak cukup bukti untuk menyatakan keberadaan autokorelasi negatif.

3.5.2.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Sugiyono (2015:277) menyatakan bahwa:

“Analisis regresi ganda oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor di manipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jika analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua”.

Menurut Sugiyono (2015:269) analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

Keterangan: Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : Konstansta, nilai Y bila X = 0 (harga konstan)

b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan.

X : Subyek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu .

3.5.2.3. Analisis Korelasi Parsial

Analisis kolerasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dihitung dengan

koefisien korelasi. Jenis korelasi hanya bisa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linier) adalah korelasi *Pearson Product Moment* (r).

Menurut Sugiyono (2016: 228)

“Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama”.

Rumus kolerasi *Pearson Product Moment* (r) adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n (\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{[n \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2][n \sum Yi^2 - (\sum Yi)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien kolerasi

X : Variabel independen

Y : Variabel dependen

n : Banyaknya sampel

Kolerasi PPM (*Pearson Product Moment*) dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga $(-1 \leq r \leq +1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya kolerasi negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada kolerasi; dan $r = 1$ berarti kolerasi sangat kuat.

Interpretasi Koefisien Kolerasi

Tabel 3.7

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Tinggi
0,80 – 1,000	Sangat Tinggi

Sumber (Sugiyono, 2016:231)

3.5.3 Uji Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan statistik uji t. pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *SPSS (Statistic Package for Social Science)* agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat. Adapun masing-masing hipotesis tersebut adalah:

H_{01} : ($\beta_1 \leq 0$) : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H_{a1} : ($\beta_1 < 0$) : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H_{02} : ($\beta_2 \leq 0$) : Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H_{a2} : ($\beta_2 < 0$) : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Tingkat signifikansi = $\alpha = 0.05$

Daerah Kritis: Tolak H_0 apabila nilai P-Value (Sig.) $\leq \alpha$.

3.5.3.1. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2016:171) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan signifikan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu:

1. Merumuskan hipotesis statistik.
2. Menghitung uji t.

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan:

r : koefisien korelasi

n : jumlah sampel

3. Kriteria pengambilan keputusan.

a. Ho ditolak jika t statistik $< 0,05$ atau t hitung $> t$ tabel

b. Ho ditolak jika t statistik $> 0,05$ atau t hitung $< t$ tabel

Nilai t tabel didapat dari:

$$df = n - k - 1$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

K : variabel independen

3.5.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi linier berganda. Menurut Kurniawan (2014:186) koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD : Koefisien Determinasi

r^2 : Koefisien Korelasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol satu. Nilai r^2 yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.6 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi fenomena yang diteliti. Sesuai dengan judul skripsi, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikut model penelitiannya :

Gambar 3.1

